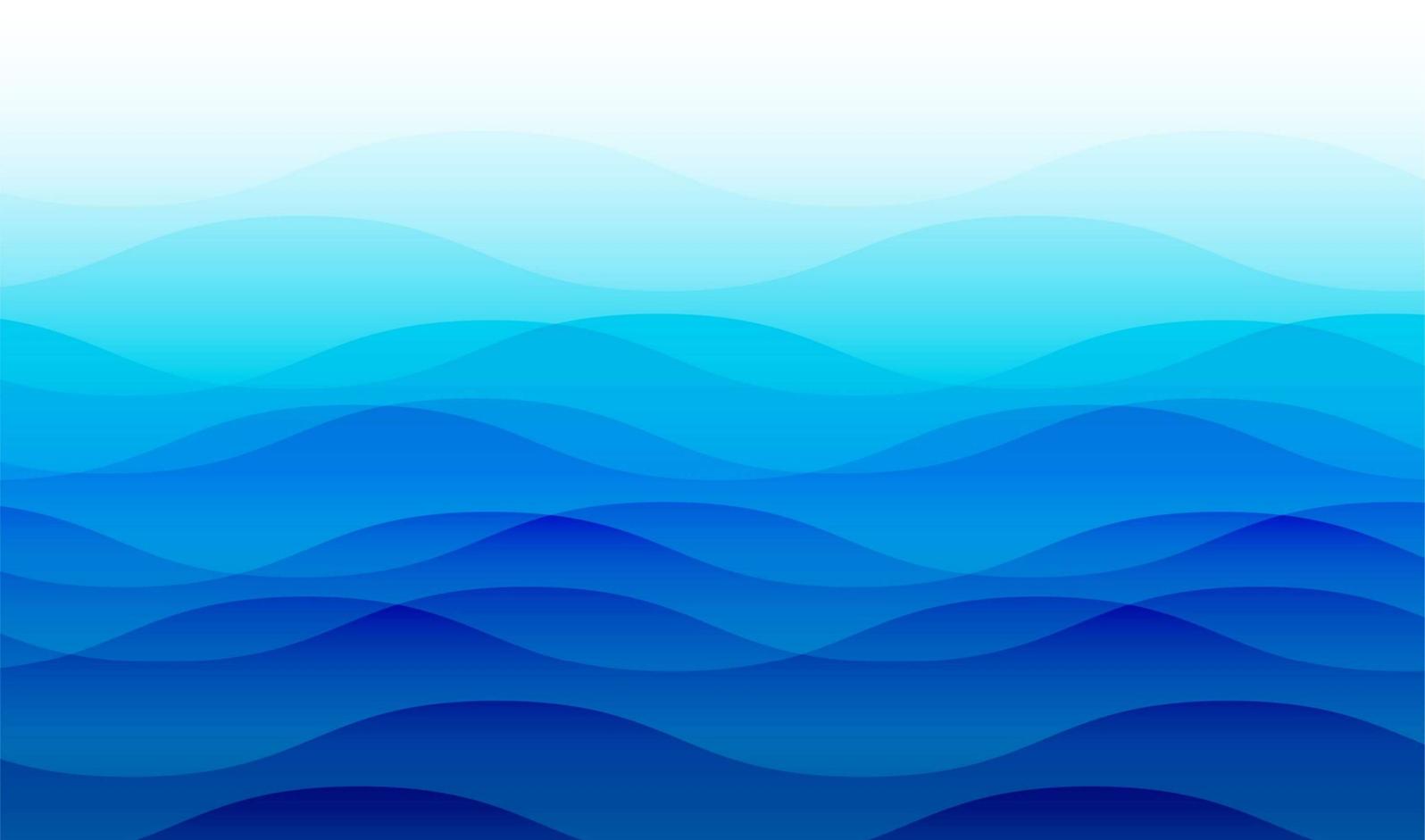




# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
PALABUHAN RATU



# KATA PENGANTAR

---

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia – Nya Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPN Palabuhanratu kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKj PPN Palabuhanratu ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang dilaporkan secara bertahap. LKj PPN Palabuhanratu triwulan III tahun 2024 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja tahun 2024.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, untuk itu kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan sangat kami harapkan agar laporan ini bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu dan turut serta dalam penyelesaian laporan ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua, Aamiin.

Palabuhanratu, 15 Oktober 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Palabuhanratu

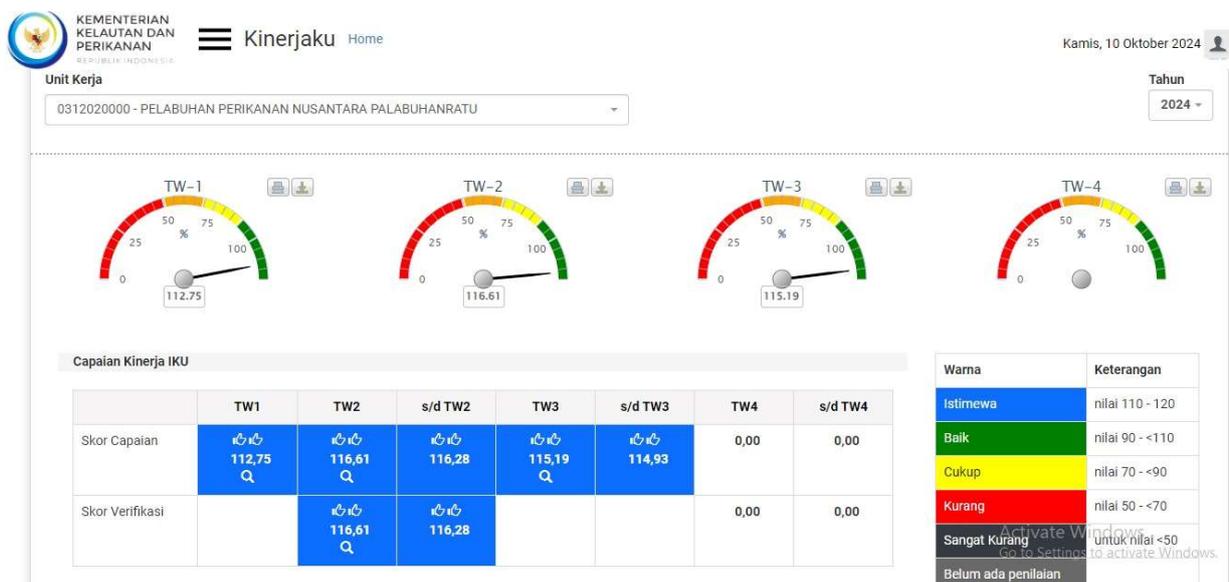


Yusuf Fathmah, S. Pi, M.Si

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 16.722.319.000,-. Dengan dukungan anggaran tersebut pada triwulan III capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp. Rp. 12.001.978.394,- atau 73,62%. Secara kinerja, PPN Palabuhanratu mendapat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,19%, sebagaimana terlihat pada *dashboard* dibawah ini:



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2024

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Gambaran Umum .....	1
1.3    Kedudukan.....	2
1.4    Tugas dan Fungsi.....	3
1.5    Aspek Strategis.....	5
1.6    Sistematik Penyajian .....	6
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1    Rencana Strategis PPN Palabuhanratu 2021 – 2024 .....	8
2.2    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
2.3    Target Kinerja dan Anggaran.....	10
2.4    Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	12
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1    Capaian Kinerja .....	15
SS 1    Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu .....	17
SS 2    Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat.....	20
SS 3    Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu .....	22
SS 4    Pengembangan dan peningkatan fasilitas Palabuhanratu yang optimal .....	24
SS 5    Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu .....	26
SS 6    Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Palabuhanratu .....	27
SS 7    Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu .....	28
3.2    Akuntabilitas Keuangan.....	35

BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan .....	37
4.2	Saran .....	38
4.3	Tindak Lanjut dari Rekomendasi Sebelumnya .....	38
4.4	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	38
LAMPIRAN DATA DUKUNG KINERJA		

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 .....	10
Tabel 2.	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024 .....	11
Tabel 3.	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 .....	12
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran ....	16
Tabel 5.	Capaian IKU "Penerimaan PNBPN di PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024 .....	18
Tabel 6.	Capaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024 .....	21
Tabel 7.	Frekuensi Kapal Bongkar Tiap Bulan di PPN Palabuhanratu Tahun 2024 .....	21
Tabel 8.	Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024 .....	23
Tabel 9.	Capaian IKU " Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024 .....	25
Tabel 10.	Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan III Tahun 2024 .....	27
Tabel 11.	Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024 .....	29
Tabel 12.	Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024 .....	34
Tabel 13.	Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2024 .....	35

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerja PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2024..... iii

Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu..... 5

Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu  
Triwulan III Tahun 2024..... 15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lima kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

### **1.2 GAMBARAN UMUM**

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan kawasan terpilih sebagai basis atau sentra pengelolaan perikanan untuk pengembangan ekonomi usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan masyarakat, melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan yang berfungsi melayani, mendorong, dan memacu pembangunan kawasan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) sebagai *mainstream* dari pembangunan kelautan dan perikanan mengingat wilayah laut/pantai dimana kegiatan perikanan berada merupakan sumberdaya anugerah potensial (*potential endowed resources*) yang khas memiliki keterkaitan (*intervedency*) yang kompleks dengan bidang sosial-perekonomian-budaya masyarakat disekitarnya. Kesiapan komponen infrastruktur/ fasilitas/ sarana penangkapan akan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut.

### **1.3 KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan Pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **1.4 TUGAS DAN FUNGSI**

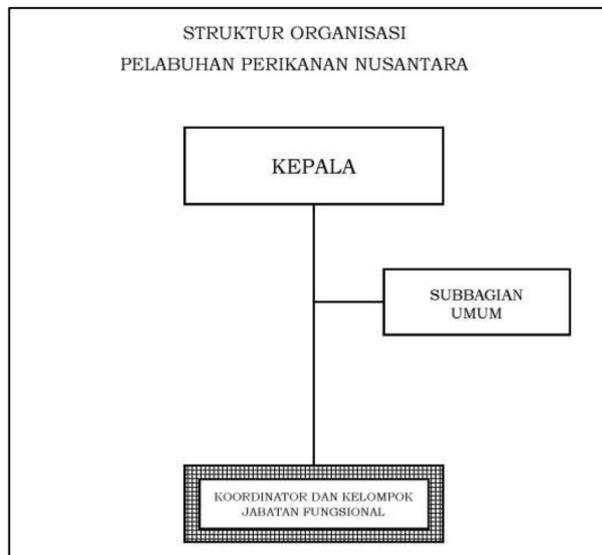
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



**Gambar 2.** *Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu*

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 1.5 ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional, dan berintegritas;

- d. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan
- e. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel.

## **1.6 SISTEMATIK PENYAJIAN**

Penyusunan LKj 2024 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/ Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini menguraikan pembahasan IKU sesuai dengan *Balanced Score Card* (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis

akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategis pemecahan masalah.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 2021 – 2024

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan serta perikanan yang berkelanjutan an Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020 – 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yaitu:

#### **VISI**

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024 adalah **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu”**

#### **MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah:

- a. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;

- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
- d. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ Lembaga lain yang beraktifitas di dalam Pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/ harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di PPN palabuhanratu;
2. Sasaran kegiatan kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah **“Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu;
3. Sasaran kegiatan ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing”**, dengan indikator kinerja:
  - a. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu;
4. Sasaran kegiatan keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal”**, dengan indikator

kinerja:

- a. Nilai pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu.
5. Sasaran kegiatan kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
6. Sasaran kegiatan ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu;
  - b. Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu;
  - c. Nilai IKPA PPN Palabuhanratu;
  - d. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Palabuhanratu

## 2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1.** Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp. Juta)	1.188,54
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.800
3	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	32
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,01

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	90
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Palabuhanratu	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	7
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu (%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	80
		16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,3

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 16.722.319.000,-.

**Tabel 2.** Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	38.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.109.853.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	40.208.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.530.258.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 16.722.319.000,-</b>

## 2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target — target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator *output* dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat

dilakukan upaya — upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu	Sosialisasi Dan Monev Pengguna Jasa Di Pelabuhan Perikanan
		Sarana Pendukung Pemungutan PNBP Pasca Produksi
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu	Penyediaan Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan
		Monitoring dan Evaluasi Hasil Tangkapan Ikan (Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Terkait Pendataan & Baju Petugas Pendataan)
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	Pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	Sarana Penunjang Perusahaan Pelabuhan
		Bimtek Dan Pembinaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Pelabuhan
		Operasional Inspeksi Pengendalian Mutu Di Pelabuhan Perikanan
		Honor Tim Pengendali Teknis
		Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan
		Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
		Publikasi Dan Promosi Pelabuhan Perikanan
		Pelaksanaan Penerbitan SPP PNBP Pasca Produksi
		Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi
		Bimtek PIPP Ke Pelabuhan Binaan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	Tata Kelola Dan Operasional Kesyahbandaran
		Operasional Kesyahbandaran Di Pelabuhan Binaan Ujung Genteng
		Operasional Kesyahbandaran Di Pelabuhan Binaan Cisolok
		Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB Di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
		Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi
		Pengelolaan Dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Di Pelabuhan Perikanan
		Desiminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Dan Penerapan Lembar Awal Di Pelabuhan Perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	Fasilitas Pendukung PNBP Pasca Produksi
		Pengadaan Fender Dermaga
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	Operasional K5 Di Pelabuhan
		Surveillance ISO 14001:2015
		Gerakan Bersih Pelabuhan
		Bulan Cinta Laut
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/ pengukuran/ pengujian/ inspeksi kapal perikanan
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
		Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah)
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	Forum Konsultasi Publik Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas
		Penguatan RB Lingkup PPN Palabuhanratu
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu	
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Kinerja Lingkup PPN Palabuhanratu
13	IP ASN PPN Palabuhanratu	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu	
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu	
16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu	Pembayaran gaji dan tunjangan
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor

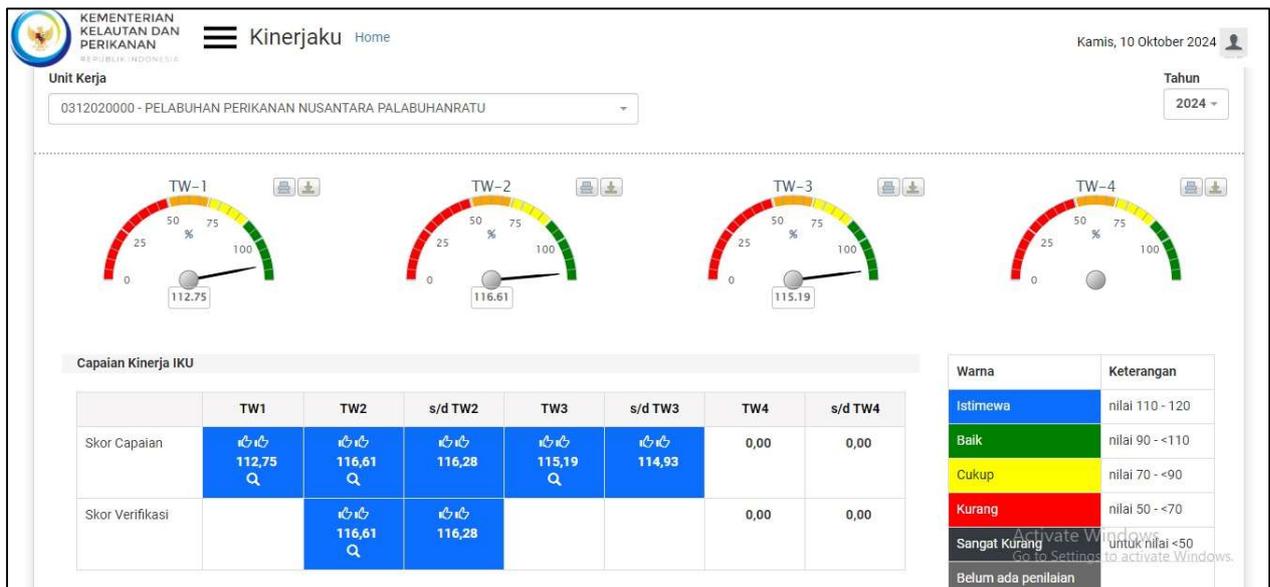
Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
		Langganan Daya dan Jasa
		Pemeliharaan Kantor
		Pelayanan Terkait Operasional Satker
		Langganan Jasa Lainnya
		Pengadaan Sarana Perkantoran
17	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu	Implementasi PIPK dan SPIP Lingkup PPN Palabuhanratu
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu	Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik Di Pelabuhan
		Pelaksanaan Penataan Dokumen Pelayanan Pelabuhan Perikanan
		Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) mendukung pembangunan perikanan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Metode pengukuran kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menggunakan aplikasi [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tambilan *dashboard* capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 seperti pada gambar 3.



**Gambar 3.** Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan III Tahun Anggaran 2024

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memperoleh rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 sebesar 115,19% dan

termasuk dalam kategori “Istimewa” ( $\geq 110$ ). Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

**Tabel 4.** Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
			Tahun 2024	TW 3 2024	TW 3 2024	%	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	1.188,54	891,39	1.300	145,84
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.800	4.000	9.396,26	234,91
3	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100			
		4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84	84	90,41	107,63
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	32			
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55			
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,10	30,01	90,49	301,53
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	90	75	162	216
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Palabuhanratu	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	7			
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80			
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	80	80	80	100
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	94			
		13	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	84			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
			Tahun 2024	TW 3 2024	TW 3 2024	%	
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu (%)	80			
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	80			
		16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	93,76			
		17	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	86			
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,3	88,3	94,50	107,02

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 7 (Sembilan) IKU yang diukur capaiannya pada triwulan III, IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp. Juta);
2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);
3. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai);
4. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai);
5. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal);
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%); dan
7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks).

### **SS 1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu**

Sasaran kegiatan - 1 “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu**

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan Pelabuhan

Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pungutan PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Adapun Jenis pelayanan jasa yang menghasilkan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi: Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan; Jasa Pas Masuk Kendaraan; Jasa Coldstorage; Jasa Kebersihan; Pengadaan Air; Penggunaan Alat Berat; Jasa Perbengkelan; Jasa Penggunaan Lahan dan Bangunan; Pengadaan Es; Jasa Tempat Penumpukan Barang; Jasa Pemakaian mess; Jasa pemakaian ruang rapat; dan Pelayanan Listrik.

**Tabel 5. Capaian IKU "Penerimaan PNBPN di PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024**

SS 1		Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu							
IKU 1		Penerimaan PNBPN di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra PPN Palabuhanratu	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-	1532,69	1188,54	279,13	486,126	163,61	40,90	-	1.188,54	40,90
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-			594,26	920,073	154,83	77,41	-		77,41
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-			891,39	1300	145,84	109,41	-		109,37
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
1532,69			-	-	-	-	-		-

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triwulan III (tiga) pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.300.292.946,- melebihi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dicanangkan dalam perjanjian kinerja pelabuhan yaitu sebesar Rp. 891.406.500,- atau 145,84% sedangkan capaian target 1 (satu) tahun sebesar 109,41%. Penerimaan tertinggi sampai dengan triwulan III (tiga) untuk periode Januari s/d

September 2024 adalah pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 245.733.426,- hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran penggunaan tanah PT Surya Agung Putra Jaya yang dibayarkan pada awal tahun, yaitu bulan Januari, selama 3 (tiga) tahun untuk jenis usaha docking dan cold storage. Penerimaan terendah pada bulan Maret 2024 sebesar Rp. 94.611.375,-. Sedangkan perbandingan penerimaan triwulan III (tiga) untuk periode Januari s/d September 2024 dengan triwulan III (tiga) untuk periode Januari s/d September 2023 menunjukkan bahwa penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 213.398.139,- dari penerimaan Rp. 1.086.894.807,- menjadi Rp. 1.300.292.946,- atau peningkatan sebesar 19,63%. Pada triwulan III terjadi peningkatan PNBPN yang diperoleh dari penerimaan jasa tambat labuh ukuran 5 – <30 GT sebesar Rp. 182.338.504,- atau 14,02% dari jumlah penerimaan triwulan III (tiga), penerimaan tambat labuh ukuran 30 - 100 GT sebesar Rp. 143.778.036,- atau 11,06% dan penerimaan pengadaan air PDAM sebesar Rp. 143.676.188,- atau 10,97%. Jika dibandingkan dengan capaian penerimaan PNBPN pada satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PNBPN PPN Palabuhanratu adalah sebesar 82,79% dengan capaian PPN Prigi sebesar Rp. 1.570.185.553,- . Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang cukup besar pada penerimaan jasa pas masuk harian untuk golongan I/R2 (Kendaraan roda 2), golongan II/R4 (Mobil), golongan III/R6 (Truk) dan juga golongan VI (Bus).

Faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PPN Palabuhanratu didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan jasa tambat labuh yang berdampak juga dengan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap.
2. Komitmen petugas pelayanan jasa PPN Palabuhanratu dalam memberikan pelayanan terbaik.

Selain faktor penentu keberhasilan ada juga faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja pada triwulan III tahun 2024 ini, yaitu:

1. Adanya tunggakan pembayaran listrik oleh pengguna jasa yang belum terbayarkan.
2. Terdapat pengguna yang belum melakukan penandatanganan perjanjian dikarenakan masih dalam tahap analisa dan evaluasi oleh petugas PPN Palabuhanratu.
3. Kerusakan pada mesin *cold storage* pada akhir bulan Agustus 2024 hingga sekarang yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan di bulan September 2024.

Berdasarkan faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan penagihan tunggakan listrik kepada pengguna jasa yang belum melakukan pelunasan.
2. Melakukan penandatanganan perjanjian dengan pengguna jasa setelah dilakukannya analisa atau evaluasi.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja penerimaan PNBP pada triwulan III tahun 2024 yaitu sosialisasi monitoring dan evaluasi pengguna jasa dan monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan bangunan.

## **SS 2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat**

Sasaran kegiatan - 2 “Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun harian. Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan dengan pencatatan/pengumpulan data oleh petugas Enumerator. Data yang telah didapatkan kemudian diolah, diverifikasi, divalidasi untuk kemudian dilaporkan secara berkala.

**Tabel 6. Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2024**

SS 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat							
IKU 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target	Realisasi		% Capaian		Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
704,76	7.131	5.800	1.000	3.570,82	375,08	61,57	506,67	5.800	61,57
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
1.730,94			2.500	5.678,5	227,14	97,90	328,05		97,90
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
4.388			4.000	9.369	107,62	161,5	213,5		161,5
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
7.131	-	-	-	-	-	-	-		

Capaian indikator kinerja ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2024 dalam perjanjian kinerja pelabuhan yaitu sebanyak 4.000 Ton dengan realisasi yaitu 9.363 Ton atau capaiannya sebesar 161,5%. Perbandingan indikator jumlah volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2023 dengan 2024 pada triwulan III menunjukkan peningkatan sebesar 213,5%. Jumlah volume produksi perikanan tangkap tertinggi berada pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 1.549 Ton sedangkan yang terendah pada bulan April 2024 sebesar 401 Ton. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu sebesar 54,14% dari realisasi capaian PPN Prigi adalah 17355,19 Ton. Peningkatan volume produksi perikanan tangkap pada trwiulan III tahun 2024 disebabkan karena meningkatnya frekuensi jumlah kapal yang melakukan pendaratan di PPN Palabuhanratu secara signifikan tiap bulannya sesuai dengan tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Frekuensi Kapal Bongkar Tiap Bulan di PPN Palabuhanratu Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Frekuensi Bongkar Tiap Bulan
1	Januari	96 Kali
2	Februari	67 Kali
3	Maret	57 Kali
4	April	41 Kali

No	Bulan	Jumlah Frekuensi Bongkar Tiap Bulan
5	Mei	46 Kali
6	Juni	58 Kali
7	Juli	65 Kali
8	Agustus	66 Kali
9	September	73 Kali

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap adalah terbatasnya jumlah petugas enumerator yang dapat mengakibatkan kemungkinan adanya data *loosing*. Berdasarkan hal tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sudah melakukan penambahan jumlah petugas enumerator dan pemberlakukan sistem *shifting* mengingat banyaknya frekuensi kapal yang melakukan pendaratan kapal.

### **SS 3. Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing**

Sasaran Kegiatan - 3 “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu, Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu, dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase dari seluruh permohonan perusahaan yang telah dianalisis atau dievaluasi dengan jumlah permohonan perusahaan yang diajukan ditambah dengan 20% dari ruang lingkup pelayanan yang sudah terstandarisasi. IKU ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu**

Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan sesuai keputusan Dirjen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja IKU

Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui aplikasi PIPP. Perhitungan tersebut didasarkan pada tersediannya data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang meliputi pengumpulan laporan Inspeksi Pembongkaran Ikan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kegiatan K5, dan PNPB yang diinput pada aplikasi PIPP.

**Tabel 8. Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024**

SS 3		Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing							
IKU 4		Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target	Realisasi		% Capaian		Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
86,25	88,58	84	84	86,08	102,48	102,48	-0,20	84	102,48
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
87,13			84	89,42	106,45	106,45	1,02		106,45
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
88			84	90,40	107,62	107,62	1,02		107,62
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
88,58	-	-	-	-	-	-	-	-	

Capaian indikator Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 90,40 dengan realisasi 107,62% atau kategori kinerja **SANGAT BAIK**. Perbandingan dengan satker lain yaitu PPN Prigi adalah sebesar 93,93% dari realisasi capaian PPN Prigi yaitu sebesar 96,25%. Nilai tertinggi ada pada frekuensi pengiriman data (PIPP) yang ada pada bulan Juli 2024 sedangkan ada beberapa komponen yang nilainya menurun pada triwulan III ini yaitu kegiatan publikasi, fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan dan perkarantinaan ikan dan perubahan jumlah investor karena menurunnya jumlah investor baru di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang terjadi penurunan pada bulan September 2024. Perbandingan indikator tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 dan 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 1,02%. Hal ini disebabkan

oleh pola pendataan yang terintegrasi dengan entri data yang tepat waktu sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika dibandingkan dengan target renstra, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 107,62%. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah ketelitian petugas operator dalam melakukan penginputan data sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi pengurangan nilai dikarenakan keterlambatan dalam penginputan data.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator baru - penyesuaian Triwulan 4 yang menunjukkan total dari Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan. Dalam pencapaian IKU ini didukung oleh 5 (lima) orang SDM, yang terdiri dari 4 orang petugas penerbitan persetujuan berlayar (PB) dan STBLKK dan 1 (satu) orang petugas penerbitan SHTI.

### **SS 4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal**

Sasaran Kegiatan – 4 “Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal” memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu dan Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan tingkat pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu dibandingkan dengan masterplan PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang

digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan sehingga belum bisa dilakukan pengukuran capaian.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan nilai pengendalian lingkungan yang didasarkan pada aplikasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). Namun mulai dari triwulan III ini terdapat pembaruan aplikasi SELARASKAN menjadi SELARASKAN V2. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

**Tabel 9.** Capaian IKU " Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024

SS 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal							
IKU 7		Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi	% Capaian		Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-	83,1	30,01	30,01	90,65	302,07	302,07	-	-	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-			30,01	96,86	322,76	322,76	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-			30,01	90,49	301,53	301,53	-		-

SS 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal							
IKU 7		Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 4		TW 4	TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
83,18		-	-	-	-		-		-

Dari target capaian sebesar 30,01, pencapaian indikator nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 92,50 atau realisasi capaian sebesar 308,23% dengan kategori “SANGAT BAIK”. Hal tersebut dapat dicapai karena beberapa faktor antara lain kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada semua indikator program *mandatory* maupun program *voluntary* serta ketepatan waktu penginputan pada Web SELARASKAN. Namun terjadi penurunan dari capaian triwulan II ke triwulan III hal tersebut dikarenakan penyesuaian penggunaan aplikasi SELARASKAN V2 yang semula menggunakan metode penginputan secara bulanan menjadi penginputan secara harian, mingguan dan bulanan. Nilai terendah pada triwulan III ini berada pada bulan Juli 2024 yaitu sebesar 84,94. Jika dibandingkan dengan capaian satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu adalah 97% dari realisasi capaian PPN Prigi sebesar 93,29. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai SELARASKAN yaitu melakukan evaluasi dengan petugas-petugas yang terlibat secara berkala dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu sehingga dapat diketahui identifikasi permasalahan yang terjadi selama dilaksanakannya pengendalian lingkungan tersebut.

**SS 5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu**

Sasaran Kegiatan - 5 “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan**

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan

yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pelabuhan binaannya. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran tahunan.

**Tabel 10. Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan III Tahun 2024**

SS 5		Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu							
IKU 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi	% Capaian		Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-	50	90	55	56	101,82	62,22	-	90	62,22
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-			60	92	153,3	102,22	-		102,22
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-			75	162	216	180	-		180
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
50			-	-	-	-	-	-	

Pencapaian indikator ini tercapai sebanyak 162 dokumen SKKP dari target pada triwulan III yaitu sebesar 75 kapal yang terdiri atas kapal daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Capaian ini meningkat sebanyak 164,2% dari Triwulan II dikarenakan terdapat peningkatan kapal yang mengajukan permohonan dari pelabuhan binaan, pelabuhan Binuangeun. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian triwulan III 2024 sebesar 180% sedangkan jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Karangantu, capaian PPN Palabuhanratu sebesar 29,5%, dimana capaian IKU 8 PPN Karangantu adalah 548 dokumen.

**SS 6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Palabuhanratu**

Sasaran kegiatan - 6 "Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu" memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak

Kapal Perikanan.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 6.9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan**

Indikator kinerja ini merupakan gabungan dari dua IKU yakni Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan dan Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan.

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah peningkatan pengetahuan/kompetensi atas awak kapal perikanan melalui kegiatan pelatihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Karena pentingnya seorang nakhoda atau awak kapal perikanan memiliki keahlian dan keterampilan, maka perlu adanya sertifikasi kompetensi sebagai bukti kecakapan nelayan dalam mengoperasikan baik kapal maupun alat penangkapan ikan. Pengukuran Indikator ini yaitu tahunan.

### **SS 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu**

Sasaran Kegiatan - 7 "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu" memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu; (3) Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu; (4) IP ASN PPN Palabuhanratu; (5) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu; (6) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu; (7) Nilai IKPA PPN Palabuhanratu; (8) Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu; dan (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan**

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi salah satu IKU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara

Palabuhanratu. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan ZI menuju WBK pada komponen pengungkit, hasil dan reform yang dihitung secara tahunan. Nilai diperoleh dari hasil penilaian tim internal KKP. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam mempersiapkan penilaian PM pembangunan zona integritas antara lain yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pemenuhan kelengkapan dokumen pembangunan zona integritas WBK.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan penyelesaian atas temuan Inspektorat Jenderal II Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan berdasarkan audit yang dilakukan pada tahun 2024. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran triwulanan.

**Tabel 71. Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024**

SS 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu							
IKU 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
100	100	80	80	100	125	125	-	-	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
100			80	100	125	125	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
100			80	80	100	100	-		-
TW 4	TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4	% TW 4 2024			
100	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pada periode triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan audit atau evaluasi oleh Inspektorat Jenderal II Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga pelayanan publik di PPN Palabuhanratu. Realisasi untuk triwulan III adalah 80% dengan capaian sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan

terdapat 2 komponen yang belum dapat terselesaikan tindak lanjutnya yaitu mengenai adanya tunggakan listrik dan perubahan tarif air PDAM. Jika dibandingkan dengan PPN Prigi, realisasi capaian PPN Palabuhanratu adalah sebesar 80% dengan capaian PPN Prigi sebesar 100%. Upaya yang telah dan masih dilaksanakan yaitu melakukan penagihan secara berkala agar tunggakan listrik dapat terlunasi serta melakukan koordinasi pada pihak PDAM terkait perubahan tarif air juga dengan Inspektorat Jenderal KKP secara terus menerus.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Palabuhanratu**

Rekonsiliasi Kinerja merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja yaitu kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Indikator ini merupakan indikator baru dengan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.13 IP ASN PPN Palabuhanratu**

Indikator ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

- Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;

- Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus- kursus, dan Seminar/ Workshop/ Magang/ Sejenis);
- Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata- rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Berdasarkan hasil perhitungan keempat dimensi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tersebut, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung Tidak Profesional); dan
- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (Sangat Tidak Profesional).

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.14 Tingkat Kepatuhan Pengaduan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu**

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa terdapat beberapa temuan berulang pada unit Eselon I lingkup KKP tiap tahunnya yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan BMN dan kegiatan prioritas/ strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa, maka dilaksanakan monitoring dalam kepatuhan pengelolaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku (LKE).

IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan progress dari IKU ini diperoleh informasi bahwa sampai dengan Triwulan III 2024 sudah melaksanakan kegiatan penguploadan rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP dan persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE sudah selesai dilaksanakan.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan capaian hingga Triwulan III 2024, maka kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelepasan aset dan penghapusan.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu**

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja.

Dasar hukum penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator antara lain:

- Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana

seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian;

- Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;
- Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disettor;
- Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
- Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;
- Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;
- Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00; dan
- Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu**

Indikator ini merupakan indikator baru (penyesuaian triwulan IV 2023) dengan perhitungan setiap triwulanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

**Tabel 12.** *Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2024*

SS 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu							
IKU 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target	Realisasi		% Capaian		Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-	92,88	88,3	88,3	92,16	104,37	104,37	-	-	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-			88,3	92,84	105,14	105,14	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-			88,3	94,50	107,20	107,20	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4	% TW 4 2024	
92,88			-	-	-	-	-	-	

Capaian nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencapai nilai 94,50, yang mana melebihi 107,02% dari target yang ditetapkan yakni 88,3. Nilai tersebut didapat dari 196 responden. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu mencapai 101,79% dari realisasi

capaian PPN Prigi yaitu 92,84%.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 telah diperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui SP DIPA — 032.03.2.560393/2024 Tanggal 30 November 2023 dengan nilai sebesar Rp.17.349.747.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan;
- b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- c. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- e. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kelima kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan. Secara rinci, anggaran tiap kegiatan yang diperoleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan anggaran yang terealisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 13.** Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN(Rp.)	%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	32.295.090	84,99
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.109.853.000	1.097.411.207	64,94
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	1.800.000	45,00
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	40.208.000	18.039.000	44,86
2342	Dukungan Manajemen Internal LingkupDitjen Perikanan Tangkap	14.530.258.000	10.841.051.597	74,61
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 16.722.319.000,-</b>	<b>Rp. 12.001.978.394</b>	<b>73,62</b>

Dari tabel 14 dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran triwulan III tahun 2024 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 12.001.978.394 (dua belas miliar satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 73,62% dari pagu sebesar Rp. 16.722.319.000,- (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

# BAB IV

## PENUTUP

---

### 4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan III tahun 2024. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelabuhan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dapat dilihat dari Dashboard Aplikasi Kinerjaku. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana tercantum dalam dashboard aplikasi Kinerjaku Tahun 2024 yaitu 115,19%.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Seluruh indikator kinerja tersebut tercapai targetnya di tahun 2024. Adapun rincian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya penertiban dan pencatatan kapal perikanan yang melakukan tambat labuh dan adanya penerimaan umum dari pendapatan jasa sewa lahan dan bangunan;
- 2) Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan pengoptimalan dalam pencatatan data hasil tangkapan dan juga adanya penambahan jumlah enumerator serta diberlakukannya sistem *shifting*;
- 3) Tingkat kinerja PPN Palabuhanratu. Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang dilakukan penginputan setiap harinya kedalam aplikasi PIPP. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah dibentuk tim khusus PIPP disetiap sub koordinator sehingga masing-masing sub koordinator mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan datanya sendiri dan tidak hanya bergantung pada satu

atau dua orang petugas PIPP untuk memasukkan data;

- 4) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan karena dokumen bukti dukung penilaian pada SELARASKAN dapat terpenuhi dan dapat melakukan penginputan data secara tepat waktu namun terdapat penurunan capaian dari triwulan sebelumnya dikarenakan oleh penyesuaian adanya pembaharuan aplikasi SELARASKAN V2.
- 5) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan. Capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan.
- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil mendapatkan nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun masih ada beberapa temuan yang belum ditindak lanjut sehingga realisasi belum bisa mencapai 100%; dan
- 7) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang baik sehingga para pengguna jasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

## **4.2 SARAN**

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, upaya – upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang yaitu antara lain:

- a) Melakukan penagihan tunggakan listrik secara rutin agar realisasi target capaian dapat mencapai 100%.
- b) Mempertahankan pelayanan jasa pelabuhan dan potensi PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk meningkatkan realisasi PNBP sebagaimana yang telah ditargetkan;
- c) Memacu petugas pelayanan jasa untuk lebih optimal dalam pelayanan;
- d) Monitoring secara lebih fokus kedepannya agar capaian indikator kinerja tersebut dapat meningkat bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- e) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut :
  - Setiap penanggungjawab kegiatan harus konsisten terhadap rencana kerja yang

telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- Perlu ditingkatkan kepedulian, evaluasi secara sistematis dalam rangka pencapaian indikator kinerja secara berkala.
- f) Mengoptimalkan sarana pelabuhan yang tersedia dan membangun sarana atau fasilitas pelabuhan untuk menunjang operasional, PNBP terutama PNBP Pasca produksi dan pelayanan pelabuhan kepada masyarakat perikanan;
- g) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen mutu bidang-bidang pelayanan pelabuhan, dengan melakukan penerapan ISO 9001:2015 secara terus-menerus guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*.

### **4.3 TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI SEBELUMNYA**

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan II tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan III tahun 2024 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi mengenai perubahan sistematika sewa tanah dan bangunan yang mulanya menggunakan PP No 85 Tahun 2021 menjadi PP No 28 Tahun 2020;
2. Menyusun pembagain tugas individu terkait penginputan pada aplikasi SELARASKAN V2 untuk meminimalisir terjadinya kesalahan input dan memaksimalkan perolehan nilai;
3. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan nilai IP ASN.

### **4.4 REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanatu triwulan III tahun 2024, rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian hasil evaluasi oleh itjen mengenai PNBP yaitu berupa tunggakan listrik dan penyesuaian tarif air dan listrik;
2. Melaksanakan pemantauan secara berkala capaian realisasi terhadap rencana RPD Halaman III DIPA.